

PELAKSANAAN KOORDINASI PENERTIBAN PENDERITA GANGGUAN JIWA STUDI KOOPERATIF DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Betty Febtia Tauri dan Tarmizi Yussa

Mahasiswi dan Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIPOL UIR

ABSTRACT

This study aims to determine the objective level Implementation Coordination Control of Patients with Mental Disorders Cooperative Study of Dinas Sosial and Pemakaman with Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru City. Indicators used include the coordination of research policies, plans, procedures and work, meetings and briefings, and a joint decree. This type of research is using the Descriptive Survey data collection such as interviews, questionnaires, and document review, and analyze the data that has been prepared on the object of research and comparing with the theory related to the problem. Then analyzed qualitatively and quantitatively for comparing reality with references that have to do with the analysis related to research in the form of concise and clear description perpetually. the location was used in this study is the Dinas Sosial and Pemakaman with satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru city. Based on this analysis technique that implements selected research concludes Coordination of Dinas Sosial and Pemakaman with Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru City is in the interval Good Enough. This Conclusion accordance with the measurement technique that has been set that is done categories Good Enough is of five indicators used have not all done well.

Keywords : Implementation, Coordination and Control

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat objektif Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Indikator penelitian koordinasi yang digunakan meliputi kebijaksanaan, rencana, prosedur dan tata kerja, rapat dan taklimat, dan surat keputusan bersama. Tipe penelitian yang digunakan Survei Deskriptif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuisioner, dan telaah dokumen, serta menganalisa data yang telah tersedia pada objek penelitian dan membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan kenyataan dengan referensi yang ada dengan melakukan dengan analisis yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk uraian secara ringkas dan jelas. Lokasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Berdasarkan teknik analisis ini penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Koordinasi Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada interval Cukup Baik. Kesimpulan ini sesuai dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan bahwa yang dilakukan kategori Cukup Baik adalah dari lima indikator yang digunakan belum semua terlaksana dengan baik.

Kata kunci : Pelaksanaan, Koordinasi dan Penertiban

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diiringi dengan meningkatnya pembangunan dan perekonomian di kota Pekanbaru yang kini telah menjadi Kota metropolitan membuat persaingan dibidang perekonomian sangat ketat yang

mengakibatkan banyak terjadi masalah kesejahteraan sosial di kota Pekanbaru. Meningkatnya pembangunan dan Pertumbuhan penduduk dimaksudkan lebih disebabkan oleh faktor imigrasi dari pada faktor kelahiran sebuah kota besar menuju kota metropolitan. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tersebut membawa

dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan Kota Pekanbaru. Dampak negatif yang menonjol diantaranya tingkat pengangguran, pemukiman kumuh, gelandangan dan pengemis (gepeng) dan gejala sosial kemasyarakatan. Adapun dampak positif dari terhadap perkembangan kota yaitu banyaknya jumlah penduduk memperoleh mudahnya mendapatkan tenaga kerja, dan meningkatkan jumlah ekonomi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterbelakangan, keterasingan atau dan Pemakaman Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2012 tentang

keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak).

Dalam penertiban psikotik gelandangan Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi Kota Pekanbaru. Pencapaian tujuan dari pelaksanaan koordinasi sangat ditentukan oleh seberapa lengkap informasi atau data tentang hal atau masalah yang dikoordinasikan yang dimiliki oleh semua pihak yang harus melakukan koordinasi, maka semakin cepat dan tepat kesamaan persepsi dan tindakan atas masalah organisasi yang dikoordinasikan itu tercapai dan demikian pula sebaliknya.

Berikut ini gambaran mengenai jumlah hasil penjarangan gelandangan psikotik yang sudah dilaksanakan oleh Tim Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, Dinas Sosial

struktur organisasi Tim Penjarangan pasien gelandangan psikotik sebagai berikut

Tabel 1. Jumlah Psikotik Gelandangan yang terjaring razia Tahun 2012

No	Waktu Pelaksanaan	Hasil Penjarangan	Laki –laki	Perempuan
1	Tahap I : 24/31 Maret 2012	17 Orang	15 Orang	2 Orang
2	Tahap II : 23 s/d 30 Juni 2012	6 Orang	5 Orang	1 Orang
3	Tahap III : 7 s/d 18 Oktober 2012	14 Orang	13 Orang	1 Orang
Jumlah		37 Orang	33 Orang	4 Orang

Sumber data dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Berikut ini gambaran mengenai jumlah hasil razia psikotik gelandangan atau penderita gangguan jiwa yang terlantar yang sudah dilaksanakan oleh Tim Rumah Sakit

Jiwa Tampan, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Psikotik Gelandangan yang terjaring razia tahun 2013

No	Waktu Pelaksanaan	Hasil Penjarangan	Laki –laki	Perempuan
1	Tahap I : 24/31 Maret 2013	10 Orang	9 Orang	1 Orang
2	Tahap II : 23 s/d 30 Juni 2013	7 Orang	6 Orang	1 Orang
3	Tahap III : 7 s/d 18 Oktober 2013	11 Orang	8 Orang	2 Orang
Jumlah		28 Orang	24 Orang	4 Orang

Sumber data dari Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru.

Dari tabel di atas maka hasil terjaring razia psikotik gelandangan atau penderita gangguan jiwa yang terlantar pada tahun 2013 pada tahap berjumlah 28 orang diantaranya 24 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan. Pada tahap I pelaksanaan penjaringan psikotik gelandangan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 10 orang di antaranya 9 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan, tahap kedua (II) pelaksanaan penjaringan psikotik gelandangan berjumlah 7 orang diantaranya 6 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan, dan tahap III adalah tahap terakhir penjaringan pada tahun 2013 berjumlah 11 orang diantaranya 8 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan.

Adapun fenomena yang penulis temui terhadap penderita Gangguan Jiwa yang berkeliaran di jalanan Kota Pekanbaru yaitu :

1. Masih terdapatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti penderita gangguan jiwa di jalanan yang mengganggu aktivitas masyarakat di jalanan Kota Pekanbaru.
2. Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya penderita gangguan jiwa yang sering merusak fasilitas-fasilitas umum yang terdapat di jalanan Kota Pekanbaru contoh nya tempat halte busway, tanaman kota.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagai mana pelaksanaan koordinasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya psikotik gelandangan di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan koordinasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya psikotik gelandangan.

Kegunaan Penelitian

1. Untuk melengkapi salah satu persyaratan perkuliahan dalam mencapai gelar S-1.
2. Sangat diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang administrasi negara umumnya, dan koordinasi pelaksanaan tugas pencapaian tujuan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya.
3. Hasil penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

Konsep Kesejahteraan Sosial

Menurut Midgelay (dalam Iswandi 2013;23) melihat Kesejahteraan Sosial sebagai Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik. Pengertian Kesejahteraan Sosial dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk melakukan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai pancasila.

Konsep Psikotik Gelandangan

Menurut Kencana (2008;25) Gelandangan psikotik adalah mereka yang hidup di jalan karena suatu sebab mengalami gangguan kejiwaan yakni mental dan sosial, sehingga mereka hidup mengembara, berkeliaran, atau menggelandang di jalanan. Dalam gelandangan psikotik ini mereka sudah tidak memiliki pola pikir yang jelas dan mereka sudah tidak lagi mementingkan mengenai norma dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, selain itu juga mereka

sudah tidak memiliki rasa malu dan memiliki amarah yang tidak bisa terkendalikan.

Konsep Koordinasi

Manusia adalah makhluk sosial dan organisasional. Ia tidak dapat hidup sendiri tanpa berkoordinasi. Koordinasi selalu diperlukan dalam setiap organisasi kecil dan besar, baik dalam organisasi yang sederhana maupun yang kompleks. Dalam mencapai tujuan organisasi selalu ada saja hal-hal yang saling berkaitan dan perlu dikoordinasikan.

Menurut Usman (2013;488) Koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Sutisna (dalam Usman 2013;488) Koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan dan sumber-sumber lain kearah terciptanya maksud-maksud yang ditetapkan.

Menurut Tjokroamidjojo (1997;53) Koordinasi adalah upaya memadukan (mengintegrasikan), menyeraskan dan meyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.

Menurut White (dalam Syafie 2006;85) Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Dengan demikian koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai orang maupun kelompok yang berbeda-beda sedemikian rupasehingga ada satu sisi semua kegiatan dapat terarah pada tujuan yang telah disepakati semula. Dari pengertian diatas pula jelaslah tanpa koordinasi antara Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam

pelaksanaan tugasnya maka penertiban pikotik/gangguan jiwa di jalanan tidak terlaksana dengan efektif dan efisien.

Konsep Perencanaan

Perencanaan pada hakikatnya adalah pemilihan saat ini terhadap kondisi masa depan yang kita kehendaki beserta langkah-langkah yang kita perlukan untuk mewujudkan kondisi-kondisi tersebut. Frasa kunci yang terdapat dalam definisi tersebut adalah pemilihan sekarang dan yang kita kehendaki. Dalam mewujudkan masa depan yang kita kehendaki, kita harus melakukan pemilihan sekarang, bukan pada masa depan.

Menurut Sedarmayanti (2009;8) Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan atau menggambarkan di muka tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien, dalam membantu terwujudnya tujuan.

Menurut George R Terry (dalam Brantas 2009;56) Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Konsep Komunikasi

Menurut Ross (dalam Sinambela, 2012:42) Komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator.

Menurut Webster (dalam Thoha 2007;170) istilah komunikasi berasal dari istilah latin *Communicare*, bentuk *partisiple* dari *Communicatio* dan *Communicatus* yang artinya suatu alat untuk berkomunikasi terutama suatu sistem penyampaian dan penerimaan berita.

Menurut Syafie (2006;59) Komunikasi secara konseptual dapat diartikan sebagai suatu proses rangkaian penataan, berupa

penyampaian warta, berita ataupun informasi, baik berupa suara, lambang ataupun kode warna dari satu orang atau beberapa orang (pihak pertama) kepada orang (pihak) lain untuk suatu tujuan tertentu.

Menurut Newman dan Summer (dalam Budiyo 2004;282) Komunikasi adalah sebagai proses pertukaran fakta, ide, opini atau emosi melalui kata-kata, surat-surat, simbol-simbol atau pesan.

Menurut Thoha (2007;167) Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau

informasi dari seseorang ke orang lain. Untuk mengetahui apakah umpan balik dalam berkomunikasi antara pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai dalam suatu organisasi tertentu.

Operasional Variabel

Dalam mewujudkan sebuah penelitian, maka penulis tampilkan operasional variabel yang merupakan realisasi dari konsep operasional dan juga mempermudah hasil penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep seperti dalam tabel berikut

Tabel 3. Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaa Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala
Koordinasi adalah upaya memadukan (mengintegrasikan)menyeraskan dan meyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Tjokroamidjojo (1997;53)	Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Ganggua Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	1. Kebijaksanaan	a. Arah tujuan yang harus dicapai. b. Pedoman untuk mencapai kesepakatan. c. Pegangan/Bimbingan untuk mencapai kesepakatan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Rencana	a. Rencana Sasaran. b. Cara melakukan. c. Waktu pelaksanaan. d. Orang yang melaksanakan dan lokasi	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Prosedur dan Tata Kerja	a. Petunjuk pelaksanaan. b. Petunjuk teknis. c. Pedoman kerja mudah diikuti dan dipahami.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Rapat dan Taklimat.	a. Memberikan pengarahan. b. Memperjelas atau menegaskan kebijaksanaan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		5. Surat Keputusan Bersama.	a. Kesepakatan dan kesatuan gerak. b. Petunjuk pelaksanaan & petunjuk teknis yg disusun masing2 instansi secara serasi	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Teknik Pengukuran

Untuk mengukur Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variabel penelitian yaitu:

Baik apabila : pelaksanaan koordinasi penertiban penderita gangguan jiwa studi kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik dan berada pada interval 67-100%.

Cukup Baik : apabila pelaksanaan koordinasi penertiban penderita gangguan jiwa studi kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru cukup terlaksana dengan baik dan berada pada interval 34-66%.

Tidak baik : apabila pelaksanaan koordinasi penertiban penderita gangguan jiwa studi kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tidak Terlaksana dengan Baik dan berada pada interval 1-33%.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Bahwa penelitian ini menarik dan menetapkan sejumlah sampel dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi dimana sampel tersebut ditarik atau ditetapkan dari sejumlah populasi penelitian .Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian survey, dimana penelitian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dan sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan

menggunakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu untuk mengungkapka fakta empiris secara objektif dengan berdasarkan logika keilmuan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Alasan dari peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut adalah karena penulis menemukan adanya fenomena masi adanya gangguan jiwa yang berkeliaran dijalanan di Kota Pekanbaru dan diduga karena kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertibannya.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan orang yang menjadi sasaran penelitian. Dari keseluruhan populasi yang luas, maka dibatasi dari sebagian dari populasi tersebut yang dikenal populasi target. (Mukhtar, 2013;93)

Menurut Mukhtar (2013;93) Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman, Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Selain dijadikan Sampel, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Penulis jadikan sebagai *key informan*. Untuk lebih detailnya masalah populasi dan sampel ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Populasi dan Sampel penelitian di Kantor Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman.	1	1	100%
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	1	1	100%
3.	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial	1	1	100%
4.	Staf Satpol PP yang tercantum dalam Kepdinsos No 08/462.2-REHSOS/2013	50	12	24%
5.	Staf Dinas Sosial dan Pemakaman yang tercantum dalam UU nomer 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan social	50	15	30%
Jumlah		103	30	

Sumber : Data Olahan pnelitian 2014

Jenis dan Sumber Data

Data-data utama yang paling penting dari pihak-pihak terkait dijadikan sebagai referensi setelah diolah. Adapun dalam penelitian ini data yang dibutuhkan terdiri dari data primer dan data skunder.

- a. Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi terutama guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan yang dihadapi yaitu informasi tentang Pelaksanaan Tuga Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
- b. Data Skunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan atas masalah yang diteliti. Data skunder berfungsi sebagai pelengkap atass data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Quisioner yaitu Teknik pengumpulan data yang memuat daftar pertanyaan (angket) yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai Pelaksanaan Tugas Satpol PP dalam Menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru khususnya psikotik gelandangan.
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang menunjukkan pertanyaan

langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang diinginkan serta yang dianggap perlu dalam penelitian.

- c. Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
- d. Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara.

PEMBAHASAN

Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, antara lain yaitu Kebijakan, Rencana, Prosedur dan Tata Kerja, Rapat dan Taklimat, Surat Keputusan Bersama.

1. Kebijakan

Kebijakan yang dibuat bersama dengan instansi terkait yakni Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selain pedoman dan petunjuk pelaksanaan

penertiban penderita gangguan jiwa juga untuk mencapai kesepakatan sehingga tercapai keterpaduan keselarasan dan keserasian dalam pencapaian tujuan. Dalam kebijaksanaan ini satuan kerja yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penertiban penderita gangguan

jiwa secara fungsional adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dengan adanya kebijaksanaan sehingga dalam penertiban penderita gangguan jiwa memiliki pedoman dan panduan dalam melaksanakan penertiban.

Tabel 5. Pendapat Responden dari (pegawai) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tentang Indikator Kebijaksanaan dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak baik	
1	Adanya pedoman dilapangan demi tercapainya tujuan kebijaksanaan	8 (47%)	5 (29%)	4 (24%)	17 (100%)
2	Mengikuti setiap pedoman guna mencapai tujuan dari kebijaksanaan	10 (59%)	5 (29%)	2 (12%)	17 (100%)
3	Kesepakatan bekerja sama dengan instansi terkait	9 (53%)	7 (41%)	1 (6%)	17 (100%)
4	Pembagian tugas sesuai dengan acuan ebijaksanaan yang telah di tetapkan	9 (53%)	8 (47%)	0 (0%)	17 (100%)
5	Memberikan arahan pedoman kebijaksanaan yang telah di tetapkan guna mencapai keselarasan tujuan	11 (65%)	5 (29%)	1 (6%)	17 (100%)
6	Kondisi yang menyatakan terlasananya tujuan bersama dari tiap-tiap instansi	10 (59%)	6 (35%)	1 (6%)	17 (100%)
Jumlah		57	36	9	102
Rata-rata		9	6	2	17
Presentase		53%	35%	12%	100

Sumber : Data olahan Penelitian 2014

Tabel 6: Pendapat Responden dari (personil) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tentang Indikator Kebijaksanaan dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak baik	
1	Adanya pedoman dilapangan demi tercapainya tujuan kebijaksanaan	7 (54%)	6 (46%)	0 (0%)	13 (100%)
2	Mengikuti setiap pedoman guna mencapai tujuan dari kebijaksanaan	8 (62%)	3 (23%)	2 (15%)	13 (100%)
3	Kesepakatan bererja sama dengan instansi terkait	10 (77%)	2 (15%)	1 (8%)	13 (100%)
4	Pembagian tugas sesuai dengan acuan ebijaksanaan yang telah di tetapkan	8 (62%)	3 (23%)	2 (15%)	13 (100%)
5	Memberikan arahan pedoman kebijaksanaan yang telah di tetapkan guna mencapai keselarasan tujuan	8 (62%)	3 (23%)	2 (15%)	13 (100%)
6	Kondisi yang menyatakan terlasananya tujuan yang sama dari tiap-tiap instansi	7 (54%)	6 (46%)	0 (0%)	13 (100%)
Jumlah		48	23	7	78
Rata-rata		8	4	1	13
Presentase		61%	31%	8%	100%

Sumber : Data olahan Penelitian 2014

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti tidak setuju jika dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dikatakan Baik, dari data yang diproses dari Dinas Sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru penderita gangguan jiwa yang terjaring mengalami penurunan yakni Tahun 2012 berjumlah 37 orang dan pada Tahun 2013 berjumlah 28 orang, sehingga bisa disimpulkan kebijaksanaan yang ada cukup baik berjalan dengan semestinya. Tetapi peneliti melihat dilapangan masi banyaknya terdapat penderita gangguan jiwa yang terlantar di Kota Pekanbaru sehingga pada indikator kebijaksanaan dalam Pelaksanaan Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi

Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dinyatakan tidak baik.

2. Rencana

Rencana digunakan sebagai alat koordinasi karna dalam rencana yang baik tertuang secara jelas, sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan, orang yang melakukan dan lokasi. Dengan adanya rencana/perencanaan maka pelaksanaan penertiban penderita gangguan jiwa akan lebih terarah karna sudah adanya perumusan atau kerangka tugas yang akan dilaksanakan sebelum melakukan razia penderita gangguan jiwa / psikotik gelandangan.

Tabel 7. Pendapat Responden dari (pegawai) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tentang Indikator Rencana dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Rencana sasaran yang telah dibuat melibatkan instansi-instansi terkait	10 (59%)	7 (41%)	0 (0%)	17 (100%)
2	Sarana dan prasarana sudah dipersiapkan dengan baik dalam perencanaan	9 (53%)	7 (41%)	1 (6%)	17 (100%)
3	Cara melakukan penertiban sudah sesuai dengan perencanaan	9 (53%)	7 (41%)	1 (6%)	17 (100%)
4	Pelaksanaan razia susah sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan	9 (53%)	8 (47%)	0 (0%)	17 (100%)
5	Waktu pelaksanaan razia sesuai dengan rencana yang di tetakan	9 (53%)	8 (47%)	0 (0%)	17 (100%)
6	Waktu pelaksanaan razia sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan	9 (53%)	7 (41%)	1 (6%)	17 (100%)
7	Orang yang melakukan razia sesuai dengan keputusan Kepkadinsos	15 (88%)	2 (12%)	0 (0%)	17 (100%)
8	Orang yang melakukan razia telah melaksanakan tugas dengan baik	8 (47%)	7 (41%)	2 (12%)	17 (100%)
Jumlah		78	53	5	139
Rata-rata		9	7	1	17
Presentase		53%	41%	6%	100%

Sumber : Data olahan Peneliti 2014

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti serta didukung pula dengan jadwal razia yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, peneliti tidak setuju dalam Pelaksanaan Koordinasi

Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dikatakan Cukup Baik.

3. Prosedur dan Tata Kerja

Tabel 8. Pendapat Responden dari (pegawai) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tentang Indikator Prosedur dan Tata Kerja dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	cukup Baik	Tidak Baik	
1	Tersedia Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan penjarangan dilapangan	13 (76%)	3 (18%)	1 (6%)	17 (100%)
2	Melaksanakan penjarangan mengacu pada petunjuk pelaksanaan	9 (53%)	2 (12%)	6 (35%)	17 (100%)
3	Disediakan petunjuk teknis dalam melaksanakan penertiban	9 (53%)	6 (35%)	2 (12%)	17 (100%)
4	Telah berpedoman pada petunjuk knis dalam pelaksanaan razia penderita gangguan jiwa	8 (47%)	9 (53%)	0 (0%)	17 (100%)
5	Pedoman kerja yang diberikan bisa dipahami	7 (41%)	9 (53%)	1 (6%)	17 (100%)
6	Pedoman kerja yang diberikan terkesan berbelit-belit atau tidak	13 (76%)	4 (24%)	0 (0%)	17 (100%)
Jumlah		59	33	10	102
Rata-rata		10	5	2	17
Presentase		59%	29%	12%	100%

Sumber : Data olahan Penelitian 2014

Tabel 9 :Pendapat Responden dari (personil) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tentang Indikator Prosedur dan Tata Kerja .

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	cukup Baik	Tidak Baik	
1	Tersedia Surat Keputusan Wali Kota Peknbaru sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan penjarangan dilapangan	7 (54%)	4 (31%)	2 (15%)	13 (100%)
2	Melaksanakan penjarangan mengacu pada petunjuk pelaksanaan	10 (77%)	2 (15%)	1 (8%)	13 (100%)
3	Disediakan petunjuk teknis dalam melaksanakan penertiban	9 (69%)	3 (23%)	1 (8%)	13 (100%)
4	Telah berpedoman pada petunjuk teknis dalam pelaksanaan razia penderita gangguan jiwa	8 (61%)	5 (38%)	1 (8%)	13 (100%)
5	Pedoman kerja yang diberikan bisa dipahami	6 (46%)	5 (38%)	2 (15)	13 (100%)
6	Pedoman kerja yang diberikan terkesan berbelit-belit atau tidak	8 (61%)	4 (31%)	1 (8%)	13 (100%)
Jumlah		48	22	8	78
Rata-rata		8	4	1	13
Presentase		62%	31%	7%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2014

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden tentang indikator Prosedur dan Tata Kerja dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diketahui bahwa sebanyak 8 orang responden atau 61% dari jawaban responden berada pada kategori baik, selanjutnya sebanyak 4 orang responden atau 31% dari jawaban responden berada pada kategori cukup baik dan yang menyatakan tidak baik berjumlah 1 orang responden atau 8%. Dengan demikian melalui beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responde, dapat diambil kesimpulan bahwa tanggapan responden terhadap indikator Prosedur dan Tata Kerja dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif

Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dikatakan Baik.

4. Rapat dan Taklimat

Rapat digunakan sebagai sarana koordinasi untuk menyatukan bahasa dan saling pengertian mengenai suatu masalah. Rapat juga digunakan sebagai sarana koordinasi untuk memberikan pengarahan, memperjelas atau menegaskan kebijaksanaan suatu masalah. Sebelum melakukan penertiban penderita gangguan jiwa/spiritik gelandangan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tentunya kedua instansi melakukan rapat terlebih dahulu untuk menyatukan persepsi,

Tabel 10 : Pendapat Responden dari (pegawai) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tentang Indikator Rapat dan Taklimat dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1	Adanya pengarahan razia sesuai dengan rapat yang dilakukan pada instansi terkait	6 (35%)	7 (41%)	4 (24%)	17 (100%)
2	Agenda rapat dengan instansi terkait bersifat rutinitas	4 (24%)	6 (35%)	7 (41%)	17 (100%)
3	diulang kembali pedoman kerja untuk memperjelas dan menegaskan kebijaksanaan yang telah dibuat	7 (41%)	8 (47%)	2 (12%)	17 (100%)
4	Penegasan, penjelasan tentang kebijaksanaan/pedoman kerja	10 (59%)	5 (29%)	2 (12%)	17 (100%)
Jumlah		27	26	14	68
Rata-rata		7	6	4	17
Presentase		41%	35%	24%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2014

Berdasarkan data tabel diatas tentang tanggapan responden Indikator Rapat dan Taklimat dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diketahui bahwa sebanyak 7 orang responden atau 54% dari jawaban responden berada pada kategori baik, selanjutnya

sebanyak 5 orang responden atau 38% dari jawaban responden berada pada kategori cukup baik dan menyatakan tidak baik berjumlah 1 orang responden atau 8%. Dengan demikian melalui beberapa item penilaian yang dinilai berdasarkan responden dan pengambilan kesimpulan bahwasanya tanggapan responden terhadap indikator Rapat dalam Pelaksanaan Koordinasi

Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dikatakan Baik.

5. Surat Keputusan Bersama

Adanya surat keputusan bersama yang berupa Sutar Keputusan Wali Kota Pekanbaru No. 170 Tahun 2002 Tentang Uraian Tugas Tim Penanggulangan Masalah Orang Sakit Jiwa Kota Pekanbaru.

Tabel 11: Pendapat Responden dari (pegawai) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tentang Indikator Surat Keputusan Bersama dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiaban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Adanya surat edaran untuk kesepakatan dan kesatuan gerak setiap instansi terkait	12 (70%)	4 (23%)	1 (8%)	17 (100%)
2	Sudah terjalin kesepakatan untuk melakukan kegiatan bersama dilapangan	5 (29%)	9 (53%)	3 (18)	17 (100%)
3	Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kegiatan bersama dilapangan	11 (65%)	1 (6%)	5 (29%)	17 (100%)
4	Jutlak dan jutnis tiap-tiap instansi terkait selaras dan saling menunjang kegiatan dilapangan sehingga akan terlihat kompak	14 (82%)	1 (8%)	2 (12%)	17 (100%)
Jumlah		42	15	11	68
Rata-rata		10	4	3	17
Presentase		59%	23%	18%	100%

Sumber : Olahan data penelitian 2014

Berdasarkan tabel diatas tentang tanggapan responden Indikator tentang Surat Keputusan Bersama dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bahwa sebanyak 7 orang responden atau 54% dari jawaban responden pada kategori baik, selanjutnya sebanyak 4 orang responden atau 31% jawaban responden berada pada kategori cukup baik dan yang menyatakan

tidak baik berjumlah 2 orang responden 15%. Dengan demikian melalui beberapa item penilaian yang menilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tanggapan responden terhadap Indikator Surat Keputusan Bersama dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dikatakan Baik

Tabel 12: Rekapitulasi Tanggapan Responden dari (pegawai) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

No	Indikator pertanyaan	Tanggapan Reponden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Kebijaksanaan	9 (53%)	6 (35%)	2 (12%)	17 (100%)
2	Rencana	9 (53%)	7 (35%)	1 (12%)	17 (100%)
3	Prosedur dan Tata Kerja	10 (59%)	5 (29%)	2 (12%)	17 (100%)
4	Rapat dan Taklimat	7 (41%)	6 (35%)	4 (24%)	17 (100%)
5	Surat Keputusan Bersama	10 (59%)	4 (23%)	3 (18%)	17 (100%)
Jumlah		45	34	11	85
Rata-rata		9	6	2	17
Presentase		53%	41%	12%	100%

Sumber :Data Olahan Penelitian 2014

Tabel 13 : Rekapitulasi Tanggapan Responden dari (personil) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

No	Indikator pertanyaan	Tanggapan Reponden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kebijaksanaan	8 (62%)	4 (31%)	1 (8%)	13 (100%)
2	Rencana	8 (62%)	4 (31%)	1 (8%)	13 (100%)
3	Prosedur dan Tata Kerja	8 (61%)	4 (31%)	1 (8%)	13 (100%)
4	Rapat dan Taklimat	7 (54%)	5 (38%)	1 (8%)	13 (100%)
5	Surat Keputusan Bersama	7 (54%)	4 (31%)	2 (15%)	13 (100%)
Jumlah		38	21	6	65
Rata-rata		8	4	1	13
Presentase		61%	31%	8%	100%

Sumber :Data Olahan Penelitian 2014

Dari penjelasan kedua tabel diatas tanggapan Pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosil dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada

pada kategori Cukup Baik, sedangkan tanggapan responden dari Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada kategori Cukup Baik

artinya Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum terlaksanakan dengan baik. Berdasarkan observasi penulis ditemui dilapangan tentang Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian responden Pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman dan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan hasil diperoleh Cukup Baik maka dapat dihasilkan berdasarkan observasi penulis dilapangan dapat diketahui Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik.

Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

1. Tidak adanya SOP tentang Penderita gangguan jiwa hanya ada Surat Keputusan Walikota Pekanbaru no 170 Tahun 2002 yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, sehingga Pelaksanaan tugas Penertiban Penderita Gangguan Jiwa sesuai dengan tugas dan fungsi setiap instansi-instansi.
2. Pelaksanaan penertiban penderita gangguan jiwa terkendala adalah keterbatasan petugas dalam menangani masalah penderita gangguan jiwa yang terlanjar atau psikotik gelandangan. Dalam daftar tim razia penderita gangguan jiwa oleh Dinas Sosial dan Pemakaman dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru petugas pelaksanaan razia hanya 13 orang. Dan tidak ada nya tim Rumah Sakit Jiwa ikut serta dalam penertiban penderita gangguan jiwa di Kota Pekanbaru yang terdaftar dari peserta penertiban, sehingga kesulitan

untuk melakukan razia penderita gangguan jiwa.

3. Tidak adanya tempat penampungan khusus penderita gangguan jiwa yang terlanjar atau psikotik gelandangan yang terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada akhirnya dilepaskan kembali.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian Mengenai Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan pada kategori untuk pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berada pada kategori presentase Cukup Baik dan untuk personil Satpol PP berada pada kategori presentase Cukup Baik. Maka dapat dijelaskan berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dapat diketahui Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita Gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memang belum terlaksana dengan baik, khususnya pada indikator rencana, penulis melihat kurangnya rencana seperti sasaran penertiban yang kurang tepat, waktu pelaksanaan yang dilaksanakan kurang tepat pada jadwal penertiban, tidak adanya tempat penampungan khusus Psikotik Gelandangan atau penderita gangguan jiwa yang terlanjar.

Saran

Adapun saran yang peneliti berikan sebagai masukan kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban penderita gangguan jiwa di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Penderita gangguan Jiwa Studi Kooperatif Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, seharusnya personil Satpol PP dan pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam berkoordinasi menertiban penderita gangguan jiwa di Kota Pekanbaru memiliki keterpaduan, keselarasan dan keserasian dalam pencapaian tujuan yang sama. Dengan demikian pelaksanaan penertiban psikotik gelandangan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Diharapkan kepada Dinas Sosial dan Pemakaman dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam melakukan razia penderita gangguan jiwa lebih sering lagi. Dengan demikian terwujudnya ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur nyaman dan tentram akan dapat tercapai.
3. Adanya kerja sama antara masyarakat dan instansi terkait tentang penertiban penderita gangguan jiwa yang terlantar di Kota Pekanbaru.

DAFTAR KEPERPUSTAKAAN

- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Haris Budiyono, Amrullah., 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Askara.
- Hasibuan, Malayu.2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Bumi Askara.
- Handoko, T Hani. 2009. *Manajemen Edisi 2 (dua)*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Husaini Usman. 2013. *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. Jakarta Bumi Askara.
- Inu, Kencana.2008. *Mereka bilang kalo aku sakit jiwa Refeksi kasus-kasus psikiatri dan problematika kesehatan jiwa di Indonesia*. Yogyakarta
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan. Gp Press Group
- Pasalong, Harbani P. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfa Beta.
- Ruminto Adi, Isbandi. 2013. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta, PT Raja Grafindo persada.
- Syafie, Inu Kencana.2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Askara
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi Edisi Refisi*. Jakarta. Bumi Askara.
- Samsudin, Sadi. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. CV Pustaka Setia.

Sedarmayanti., 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung, CV Mandar Maju.

Sinambela, Lijan Poltak., 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Suharto , Edi. 2012. *Analiis Kebijakan Publik*. Bandung , Alfabeta.

Tjokomidjojo, Bintaro.1997. *Sistim Administrasi Republik Indonesia*, jilid A / Edisi Kedua. Jakarta. PT Toko Gunung Agung.

Thoha, Miftah., 2007. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta, Rajawali Pers.

Usman, Husaini.,2013. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.

Usman, Husaini. 2013. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta. Bumi Askara.

Zulkifli. 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru. UIR Pres.

Dokumentasi :

Pekanbaru Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2013

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Peraturan Walikota Pekanbaru No 8 tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru No 9 tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru No 170 Tahun 2002 Uraian Tugas Tim Penanggulangan Masalah Orang Sakit Jiwa Kota Pekanbaru

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

